

## BAB - III

### RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

#### 3.1 Prospek dan tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015

##### 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Capaian Tahun 2013

Di tengah pelemahan ekonomi global yang masih berlanjut, perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2012 masih tumbuh cukup kuat, terutama ditopang oleh permintaan konsumsi rumah tangga. Inflasi tetap terkendali pada level yang cukup rendah. Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan kerjasama yang kondusif dengan otoritas moneter, dalam upaya menjaga momentum perekonomian, di tengah melambatnya perekonomian global dengan tetap memelihara kestabilan makro ekonomi. Kuatnya perekonomian Sumatera Utara di tengah lemahnya ekonomi global menyebabkan meningkatnya defisit transaksi berjalan selama tahun 2012 pada tingkat nasional, dan syukur pada tingkat regional Provinsi Sumatera Utara kondisi defisit transaksi berjalan tidak terjadi.

Berdasarkan kondisi perekonomian makro Tahun 2012, Provinsi Sumatera Utara masih tumbuh relatif baik, hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,22%, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 349,27 triliun, PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 sebesar Rp. 136,46 triliun, PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 26,26 juta atau jika di kurs tengah dollar berkisar 2.735 dollar AS/kapita. Adapun sumbangan PDRB Sumatera Utara terhadap PDB Nasional di tahun 2012 adalah sebesar 5,3% meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang menyumbang sebesar 5,2% dan menempati urutan ke-7 sebagai penyumbang PDB Indonesia,

Adapun secara rinci disampaikan 10 Provinsi Penyumbang PDB terbesar Indonesia di Tahun 2011 dan 2012.

Tabel 3.1.  
Provinsi penyumbang PDB terbesar di Indonesia (2011-2012)

No	Provinsi	Kontribusi PDRB terhadap PDB		Shift
		2011	2012	
1	DKI Jakarta	16,50	16,80	0,30
2	Jawa Timur	14,70	14,90	0,20
3	Jawa Barat	14,20	13,90	-0,30
4	Jawa Tengah	8,00	7,90	-0,10
5	Kalimantan Timur	6,60	5,90	-0,70
6	Riau	7,00	7,10	0,10
7	Sumatera Utara	5,20	5,30	0,10
8	Banten	3,20	3,20	0,00
9	Sumatera Selatan	3,00	3,10	0,10
10	Sulawesi Selatan	2,20	2,40	0,20

Jika dilihat dari struktur ekonomi pembentuk PDRB pada tahun 2012 sektor industri pengolahan masih menjadi menyumbang terbesar yakni sebesar 22,07%, diikuti sektor pertanian sebesar 21,88%, Perdagangan, Hotel, dan Restoran mencapai 19,09%, Jasa - jasa 11,12%, Pengangkutan dan Komunikasi mencapai 9,36%, Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 7,53%, Bangunan sebesar 6,72%, Pertambangan dan Penggalian 1,32%, Listrik, Gas, dan Air Bersih mencapai 0,91%.

Bila dilihat dari struktur pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar bagi pembentuk PDRB Sumatera Utara, dimana pada tahun 2012 memberikan sumbangan sebesar 59,29%, meningkat bila dibandingkan kondisi tahun 2011 yang memberikan sumbangan sebesar 59,22%, selain itu dari sisi Pembentukan Modal Tetap Bruto (investasi) terjadi peningkatan kontribusi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana

tahun 2011 PMTB memberikan sumbangan bagi PDRB sebesar 20,54% dan di tahun 2012 menjadi 21,12, di urutan ketiga penyumbang PDRB adalah konsumsi pemerintah yang memberikan kontribusi sebesar 10,03%, walaupun hal ini menurun bila dibandingkan dengan posisi yang sama di tahun 2011 yang memberikan kontribusi sebesar 10,16%, dan kemudian diurutkan selanjutnya adalah perdagangan luar negeri yang memberikan sumbangan di tahun 2012 sebesar 9,19% menurun bila dibandingkan dengan 2011 yang memberikan sumbangan sebesar 9,26%, hal ini sebagai dampak dari pelemahan ekonomi global yang berimplikasi pada penurunan kinerja ekspor Sumatera Utara.

Dari sisi perdagangan luar negeri Sumatera Utara juga masih surplus sebesar 5,23 milyar US\$ di tahun 2012 dengan rincian volume Ekspor sebesar 8,69 juta/Ton, dengan nilai sebesar US\$ 10,39 milyar, kondisi tidak lebih baik dari capaian tahun 2011 dimana nilai ekspor Sumatera Utara mencapai US\$ 11,88 miliar, dengan volume ekspor sebesar 8,16 juta ton, adapun Volume Impor di tahun 2012 sebesar 6,81 juta/ton dengan nilai sebesar US\$ 5,16 milyar, sehingga dapat dikatakan bahwa impor di tahun 2012 meningkat baik dari sisi volume maupun nilai, sehingga hal ini harus diantisipasi kedepan terlebih dengan akan dibukanya kran perdagangan bebas ASEAN melalui pemberlakuan ASEAN Economy Community (AEC) di tahun 2015.

Tingkat pencapaian realisasi investasi di Provinsi Sumatera Utara baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2012 juga masih menunjukkan kondisi yang relative lebih baik bila dibandingkan tahun 2011, dimana untuk PMA dari realisasi investasi dengan total proyek 101 proyek dengan nilai US\$ 645,3 juta, memang sedikit lebih menurun dibandingkan realisasi investasi PMA di tahun 2011 yang mencapai US\$ 658,46 juta, akan tetapi jumlah proyek di tahun 2011 hanya sebesar 65 proyek, sementara untuk PMDN di tahun 2012 realisasinya lebih baik dari 2011 dimana nilai realisasi mencapai Rp. 2,97 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 8.575 orang dan ini meningkat bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 dimana realisasi investasi sebesar Rp. 2,00 triliun dan serapan tenaga kerja sebanyak 4.289 orang.

Pencapaian tingkat inflasi Sumatera Utara Tahun 2012 mencapai 3,86%, tingkat inflasi ini lebih baik/rendah dari capaian nasional yang mencatat nilai inflasinya sebesar 4,30%, adapun kondisi Nilai Tukar Petani ( NTP ) pada tahun 2012 (Desember) telah mencapai sebesar 101,51 kondisi ini sedikit dibawah dari capaian tahun 2011 (Desember) yang mencapai 103,13.

### **3.1.2 Prospek dan tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015**

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2012 tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Berbagai permasalahan ekonomi dunia, baik di Eropa maupun di Amerika Serikat (AS), yang belum sepenuhnya dapat diatasi mengakibatkan pemburukan ekonomi global yang telah terjadi sejak akhir tahun 2011 masih berlanjut di tahun 2012. Perekonomian kawasan Eropa masih mengalami pertumbuhan yang negatif, sementara ekonomi AS mulai membaik meskipun masih rentan dan dibayangi isu keterbatasan stimulus fiskal (*fiscal cliff*). Kontraksi pertumbuhan ekonomi Eropa disebabkan oleh krisis utang fiskal, sempitnya ruang kebijakan moneter, meningkatnya angka pengangguran, rapuhnya sektor keuangan, dan menurunnya kepercayaan pasar. Memburuknya perekonomian di negara-negara maju telah memberikan dampak pada melambatnya perekonomian sebagian besar negara emerging markets seperti China dan India. Berdasarkan kondisi tersebut, ekonomi dunia tahun 2012 hanya tumbuh sebesar 3,3%, lebih rendah dari tahun 2011 sebesar 3,8%.

#### **TINJAUAN KEBIJAKAN MONETER**

Inflasi dunia selama tahun 2012 secara umum mengalami penurunan sejalan dengan perlambatan ekonomi dunia, melemahnya pertumbuhan ekonomi global yang khususnya komoditas nonmigas.alam (SDA), termasuk komoditas hasil pertanian. Komoditas logam dasar dan batubara tercatat mengalami penurunan harga yang cukup tinggi yang merupakan konsumen terbesar di dunia dari kedua komoditas tersebut. Inflasi negara maju serta melemahnya perekonomian dan rendahnya besaran PDB negara mengalihkan fokusnya dari pengendalian inflasi ke pertumbuhan ekonomi. Negara yang longgar disertai dengan langkah ekonomi. Sementara itu, beberapa negara berkembang merespons pelemahan ekonominya dengan

melakukan kebijakan moneter yang akomodatif perlambatan ekonomi global secara signifikan. memiliki keterbatasan fiscal space ruang untuk memberikan stimulus fiscal longgar yang diterapkan oleh negara pasar keuangan global yang sebagian besar di tahun 2012 secara umum mengalami penurunan sejalan dengan kondisi perekonomian global. Penurunan inflasi tersebut berdampak pada menurunnya harga komoditas dunia. Penurunan harga banyak terjadi pada komoditas berbasis sumber daya terutama disebabkan oleh perlambatan ekonomi China yang pertumbuhan ekonominya hanya mencapai angka 7,96% dibawah estimasi yang diprediksi mencapai 8-9%.

Melemahnya perekonomian dan rendahnya inflasi mendorong otoritas moneter di sebagian besar Negara mengalihkan fokusnya dari pengendalian inflasi kepada upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Negara-negara maju secara umum tetap mempertahankan kebijakan moneter yang longgar disertai dengan berbagai langkah non konvensional sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara itu, beberapa negar berkembang merespon pelemahan ekonominya dengan melakukan kebijakan ekonomi yang akomodatif, terutama di Negara-negara yang terkena dampak perlambatan ekonomi secara signifikan. Di sisi kebijakan fiscal, berbeda dengan Negara maju yang memiliki keterbatasan fiscal space, Pemerintah di Negara berkembang umumnya masih memiliki ruang untuk memberikan stimulus fiscal untuk mendorong perekonomiannya. Kebijakan moneter longgar yang diterapkan Negara-negara maju tersebut pada akhirnya meningkatkan likuiditas di pasar global yang sebagian besar mengalir ke Negara-negara berkembang kawasan Asia.

Pada triwulan I 2013 secara *years on years* (yoy) pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tumbuh sebesar 6,14%, walaupun belum seperti yang diestimasikan, akan tetapi capaian ini lebih baik dari nasional. Peningkatan ini didukung oleh pertumbuhan pada hampir semua sektor ekonomi, kecuali Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Bangunan, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan Sektor Jasa-jasa yang mengalami penurunan pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Sektor Pertanian yang mencapai 6,55 persen (q-to-q). Sektor lain yang juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi terutama Sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel tumbuh sebesar 6,24 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada Sektor Industri Pengolahan mengalami kontraksi sebesar 2,10 persen.

Berikut ini disajikan kondisi laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara Triwulan I 2013 menurut lapangan usaha.

Tabel 3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2013 menurut lapangan usaha

Lapangan Usaha/Sektor	Triw IV 2012	Triw I 2013	Triw I 2013	Sumber
	terhadap	terhadap	terhadap	Pertumbuh
	Triw III 2012	Triw IV 2012	Triw I 2012	(year on year)
-1	-2	-3	-4	-5
1. Pertanian	-2,24	6,55	5,93	1,39
2. Pertambangan dan Penggalian	6,23	-1,36	6,44	0,07
3. Industri Pengolahan	-0,09	-2,1	2,55	0,52
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	1,51	0,43	5,09	0,04
5. Bangunan	3,82	-1,94	6,27	0,43
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,38	6,24	7,61	1,46
7. Pengangkutan dan Komunikasi	2,07	1,81	8,63	0,88
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,17	-1,91	8,55	0,68
9. Jasa-jasa	2,41	-0,44	6,58	0,67
<b>PDRB</b>	0,61	2,04	6,14	6,14

Dari data yang disajikan diatas diperoleh hasil bahwa sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi yang dicapai di triwulan I 2012 berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan andil sebesar 1,46%, disusul oleh sektor pertanian sebesar 1,39%, adapun andil terkecil diperoleh dari sektor listrik, gas dan air bersih yang memberikan sumbangan pertumbuhan sebesar 0,04%.

Sementara itu PDRB Sumatera Utara atas dasar harga berlaku pada triwulan I tahun 2013 mencapai Rp.96,50 triliun, sedangkan berdasar atas dasar harga konstan 2000 tercapai sebesar Rp.35,04 triliun. Atas dasar harga berlaku, sektor ekonomi yang menunjukkan nilai tambah bruto yang terbesar pada triwulan I tahun 2013 adalah Sektor Pertanian dengan nilai sebesar Rp.21,48 triliun, disusul oleh Sektor IndustriPengolahan sebesar Rp.20,45 triliun, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar Rp.18,77 triliun, Sektor Jasa-jasa sebesar Rp.10,74 triliun, sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar Rp.9,16 triliun, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar Rp.7,16 triliun, dan Sektor Bangunan sebesar Rp.6,58 triliun. Sektor ekonomi lainnya yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian menghasilkan nilai tambah bruto sebesar Rp.1,28triliun, dan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar Rp.865,25 miliar.

Berikut ini disajikan data PDRB Sumatera Utara triwulan I 2013 dibandingkan dengan triwulan IV 2012

Tabel 3.3. PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha/Sektor  
(Milyar rupiah)

Lapangan Usaha/Sektor	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2000	
	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan IV	Triwulan I
	2012	2013	2012	2013
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1. Pertanian	19.629,76	21.484,22	7.692,54	8.196,75
2. Pertambangan dan Penggalian	1.258,68	1.278,84	402,83	397,37
3. IndustriPengolahan	20.211,17	20.450,56	7.012,37	6.865,44
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	833,42	865,25	249,25	250,31
5. Bangunan	6.509,32	6.577,70	2.445,82	2.398,36
6. Perdagangan, Hotel danRestoran	17.526,57	18.772,88	6.429,31	6.830,24
7. PengangkutandanKomunikasi	8.877,83	9.161,81	3.584,55	3.649,34
8. Keuangan, PersewaandanJasa Perusahaan	7.124,31	7.162,31	2.910,58	2.855,13
9. Jasa-jasa	10.466,45	10.743,53	3.614,26	3.598,20
<b>PDRB</b>	<b>92.437,51</b>	<b>96.497,09</b>	<b>34.341,52</b>	<b>35.041,14</b>

Pada triwulan I tahun 2013, Sektor Pertanian masih mendominasi struktur PDRB Sumatera Utara yakni sebesar 22,26 persen, diikuti oleh Sektor Industri Pengolahan yaitu 21,19 persen, Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran 19,45 persen, sektor jasa-jasa 11,13 persen, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 9,50 persen, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 7,42 persen, Sektor Bangunan 6,82 persen, Sektor Pertambangan dan Penggalian 1,33 persen dan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 0,90 persen. Adapun struktur PDRB Sumut triwulan I 2013 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3. Struktur PDRB Sumatera Utara Triwulan - I Tahun 2013**

Lapangan Usaha/Sektor	Struktur	
	Triwulan IV	Triwulan I
	2012	2013
[1]	[2]	[3]
1. Pertanian	21,24	22,26
2. Pertambangan dan Penggalian	1,36	1,33
3. Industri Pengolahan	21,87	21,19
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,9	0,9
5. Bangunan	7,04	6,82
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	18,96	19,45
7. Pengangkutan dan Komunikasi	9,6	9,5
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,71	7,42
9. Jasa-jasa	11,32	11,13
<b>PDRB</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Perekonomian Indonesia kedepan diperkirakan akan mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 diperkirakan dapat mencapai kisaran 6,7-7,2 dan di tahun 2015 sebesar 6,9-7,3, hal ini terutama didorong oleh masih kuatnya pran konsumsi dan investasi serta dengan mempertmbangkan perekonomian dunia yang lebih baik. Peningkatan konsumsi tersebut antara lain terkait dengan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 2014. Secara sektoral, pertumbuhan perekonomian masih akan didorong oleh kinerja sektor industri pengolahan, sector perdagangan, hotel dan restoran serta sektor transportasi dan komunikasi.

Perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan begitu pula dengan Sumatera Utara terjadi seiring dengan masih kuatnya permintaan domestik dan kondisi eksternal yang tetap baik, permintaan domestik khusus untuk Sumatera Utara masih mendominasi dari struktur PDRB, akan tetapi perlahan telah terjadi pergeseran dimana investasi (PMTB) telah mulai meningkatkan kontribusinya dalam pembentukan PDRB dimana pada tahun 2012 PMTB telah menjadi penyumbang kedua terbesar dalam struktur PDRB Sumatera Utara yang mencapai 21,12%, sementara di tahun 2011 hanya mencapai 20,54%.

Khusus untuk sasaran Sumatera Utara sebagaimana yang ditargetkan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 untuk tahun 2014 sebagaimana hasil analisis perekonomian global dan nasional yang akan berimplikasi kepada ekonomi Sumatera Utara ditargetkan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara adalah 6,96%, tentunya target ini jauh lebih optimis dari sasaran yang ingin dicapai nasional, hal ini akan dapat tercapai terlebih lagi dengan semakin giatnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperbaiki fasilitas infrastruktur ditambah lagi dengan tahun 2013 perkiraan Bandara Kuala Namu akan selesai pembangunannya, demikian juga fasilitas pendukungnya.

Peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi diperkirakan juga akan semakin meningkat, hal ini didorong berbagai faktor positif seperti potensi pencapaian *investment grade* yang semakin membaik serta perbaikan iklim investasi dan birokrasi, khususnya dengan telah dibentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan batas waktu pemberian izin investasi (*doing business*) yang semakin dipersingkat prosesnya.

Dari sisi eksternal, ekspor diperkirakan tumbuh kuat memenuhi permintaan di negara-negara partner dagang, khususnya untuk komoditi unggulan Sumatera Utara seperti kelapa sawit dan karet dimana direncanakan bahwa pada tahun 2015 KEK Sei Mangkei telah dapat beroperasi.

Untuk tahun 2014 dan 2015 berdasarkan PDRB lapangan usaha, peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama akan didukung oleh sektor industri pengolahan, Sektor Pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pengangkutan dan komunikasi.

Sementara dari sisi investasi, prospek investasi juga akan cerah, hal ini didorong oleh berbagai faktor antara lain stabilitas makroekonomi yang diperkirakan tetap terjaga serta potensi pasar di Indonesia begitu pula dengan Sumatera Utara karena besarnya jumlah populasi dibanding daerah Provinsi lainnya di luar Jawa.

Volume perdagangan luar negeri khususnya ekspor juga diperkirakan akan tumbuh diatas 6%, bahkan untuk pasar negara-negara berkembang lebih besar dari 6%, sementara untuk negara maju diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,7%, selain faktor permintaan ekspor Sumatera Utara tahun 2014 dan 2015 juga tumbuh kuat dengan dorongan dari trend kenaikan harga komoditas, dengan kuatnya permintaan domestik dan tingginya pertumbuhan ekspor juga akan mendorong impor barang dan jasa yang diperkirakan akan tumbuh sekitar 10%-12% pada tahun 2014 dan 2015. Dengan demikian kinerja ekspor yang tumbuh kuat juga akan menyebabkan pertumbuhan impor pada trend yang sama.

Adapun untuk besaran laju pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi ADHK secara lengkap disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.4. Besaran Laju Pertumbuhan Ekonomi Dari Sisi Produksi ADHK**

Komponen Produksi	Laju Pertumbuhan		Kontribusi	
	2014	2015	2014	2015
1. Pertanian	4,35	5,82	22,37	22,10
2. Pertambangan dan Penggalian	6,04	8,04	1,15	1,16
3. Industri Pengolahan	0,17	7,8	21,75	21,89
4. Listrik, gas dan air bersih	9,77	5,74	0,78	0,77
5. Bangunan	7,42	7,42	6,99	7,01
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,24	7,96	18,85	19,00
7. Pengangkutan dan Komunikasi	7,6	6,79	10,06	10,03
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,9	7,24	8,00	8,01
9. Jasa-jasa	5,91	6,9	10,05	10,03
<b>PDRB</b>	<b>6,96</b>	<b>7,11</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Data diolah Bappedasu

Perkembangan sektor pertanian pada tahun 2014 dan 2015 masih akan diwarnai dengan fenomena anomali cuaca yang diperkirakan akan dapat mempengaruhi produksi dan produktifitas sektor pertanian, sejauh ini anomali cuaca sedang dicarikan jalan keluarnya khususnya untuk komoditas padi dengan menciptakan varietas baru yang tahan akan curah hujan tinggi dan hama penyakit, penyediaan fasilitas infrastruktur pertanian seperti perbaikan irigasi dan pembangunan beberapa bendungan maupun embung di daerah strategis tanaman pangan akan tetap menjadi perhatian khusus baik Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan subsidi BBM dengan melakukan berbagai program antara lain pembatasan pemakaian BBM bersubsidi maupun rencana menaikkan harga BBM pada tahun 2013 yang akan berimplikasi pada ekonomi tahun 2014, juga akan diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan mengembangkan secara bertahap energi-energi baru dan terbarukan.

Dengan prospek perekonomian tersebut diatas, maka diharapkan sasaran-sasaran makro ekonomi Sumatera Utara akan tetap dapat tercapai untuk peningkatan pembangunan Sumatera Utara, akan tetapi berbagai tantangan dalam mewujudkan sasaran-sasaran makro ekonomi harus diantisipasi, adapun beberapa tantangan tersebut antara lain :

1. Kekhawatiran terhadap pemulihan ekonomi global karena ketidakjelasan penanganan krisis ekonomi di negara-negara Eropa dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang akan mendorong kenaikan komoditas pangan.
2. Sumatera Utara masih tergolong daerah rawan bencana baik banjir, longsor, gunung berapi khususnya di beberapa daerah yang justru menjadi sentra produksi pangan seperti Karo, Mandailing Natal, Serdang Bedagai, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Deli Serdang, Asahan dan Kabupaten lainnya.
3. Harga minyak dunia yang kecenderungannya juga akan semakin tinggi, dengan berbagai faktor penyebab, diantaranya kebijakan pemerintah yang akan menurunkan subsidi Bahan bakar Minyak (BBM) dan energi listrik serta energi gas, hal ini akan mendorong peningkatan biaya produksi yang berimbas pada tidak kompetitifnya produk-produk Indonesia dan Sumatera Utara khususnya.
4. Potensi tekanan inflasi sebagai dampak kebijakan Pemerintah di bidang harga (*administrated price*) dan adanya kemungkinan dari sisi volatile food, sebagai dampak gejala harga pangan dunia
5. Kondisi infrastruktur yang masih memprihatinkan dan perlu ditingkatkannya belanja pemerintah untuk keperluan infrastruktur ini disamping menerapkan KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) untuk membangun jalan, jembatan, pelabuhan, perlistrikan, telekomunikasi dan lain-lain, terlebih lagi dengan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, kawasan industri lainnya, Kota baru yang akan sangat membutuhkan fasilitas infrastruktur yang lebih baik lagi agar investor berkeinginan berinvestasi di daerah Sumatera Utara.
6. Masalah pengangguran dan kemiskinan serta pemerataan pembangunan (disparitas pendapatan perkapita) masih menjadi masalah ekonomi utama yang sampai saat ini belum bisa diatasi, terlebih lagi banyaknya yang meragukan jumlah angka pengangguran dan kemiskinan serta standar yang dipergunakan untuk pengukurannya.

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah, pada dasarnya berkaitan dengan kondisi perekonomian Sumatera Utara yang diharapkan antara lain :

- Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2014 diasumsikan sebesar 6,96 %, Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp.454,52 triliun, sementara Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp. 153,28 triliun dan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) antara 3,00% - 4,00%. Tingkat inflasi diestimasikan sebesar 7,13%.
- Nilai Ekspor ditargetkan pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 12,15 milyar US\$ meningkat dari target tahun 2013 yang sebesar Rp. 11,01 milyar US\$; demikian halnya dengan nilai impor tahun 2014 diperkirakan mencapai 6,05 milyar US\$ meningkat dari target tahun 2013 sebesar 5,85 milyar US\$ hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian dunia khususnya Indonesia telah mengalami perbaikan, dimana sebelumnya mengalami krisis di belahan Eropa, Amerika Serikat dan berimbas pada China dan Asia umumnya, termasuk Indonesia dan Sumatera Utara khususnya.
- Penduduk miskin yang ditargetkan turun menjadi sebesar 9,50-10,00%.
- Tingkat pengangguran terbuka yang ditargetkan turun menjadi 5,90% pada tahun 2014, lebih baik dibandingkan dengan target tahun 2013 yang diperkirakan sebesar 6,90%.

Adapun untuk secara garis besarnya berikut disampaikan realisasi dan perkiraan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara dalam tabel :

**Tabel 3.5. Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 s.d tahun 2015**

Kod Rek	URAIAN	Jumlah				
		Realisasi APBD Tahun 2011	Realisasi APBD Tahun 2012	Tahun Berjalan 2013	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2014	Proyeksi /Target pada Tahun 2015
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan asli daerah</b>	<b>3.578.462.081.780</b>	<b>4.052.104.891.352</b>	<b>4.809.369.031.556</b>	<b>5.350.802.214.077</b>	<b>5.900.317.452.331</b>
1.1.1	Pajak daerah	3.141.123.907.438	3.636.074.646.214	4.276.706.265.923	4.798.486.017.834	5.326.319.479.796
1.1.2	Retribusi daerah	31.297.593.623	33.494.827.707	44.171.451.121	46.380.023.677	51.945.626.518
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	289.249.771.252	263.801.190.345	305.173.490.912	306.021.172.566	312.141.596.017
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	116.790.809.467	118.734.427.086	183.317.823.600	199.915.000.000	209.910.750.000
<b>1.2</b>	<b>Dana perimbangan</b>	<b>1.373.897.541.087</b>	<b>1.605.181.559.563</b>	<b>2.007.091.015.600</b>	<b>1.801.542.806.166</b>	<b>1.974.128.675.401</b>
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	386.544.541.087	460.163.932.563	710.547.681.600	375.925.982.044	390.983.021.328
1.2.2	Dana alokasi umum	948.867.500.000	1.103.389.237.000	1.223.445.404.000	1.352.518.894.122	1.501.295.972.475
1.2.3	Dana alokasi khusus	38.485.500.000	41.628.390.000	73.097.930.000	73.097.930.000	81.869.681.600
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>6.122.275.000</b>	<b>1.544.552.841.771</b>	<b>1.665.411.602.800</b>	<b>1.685.200.163.800</b>	<b>1.694.160.163.800</b>
1.3.1	Hibah	6.122.275.000	25.579.152.521	65.839.442.800	85.200.163.800	85.200.163.800
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	1.518.973.689.250	1.599.572.160.000	1.600.000.000.000	1.608.960.000.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	-	-	-	-	-
1.3.6	lainnya	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)</b>	<b>4.958.481.897.867</b>	<b>7.201.839.292.686</b>	<b>8.481.871.649.956</b>	<b>8.837.545.184.043</b>	<b>9.568.606.291.532</b>

Ketahanan fiskal Daerah akan terus ditingkatkan. Perkiraan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2013 termasuk Pendapatan Asli Daerah, penerimaan Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 8.481.871.649.956,-, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 4.809369.031.556,-. Dana Perimbangan sebesar Rp. 2.007.091.015.600,- serta Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp.1.665.411.602.800,-.

Sedangkan pada tahun 2014 estimasi penerimaan sektor Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara akan diprediksi meningkat diperkirakan sebesar 11,26%, antara lain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 12,20% atau Rp. 5.350.802.214.077,- Dana Perimbangan diperkirakan akan menurun sebesar -10,24% yakni menjadi Rp. 1.801.542.806.166,-, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah diperkirakan akan meningkat sebesar 1,19% menjadi Rp. 1.685.200.163.800,- penerimaan ini belum termasuk sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2013.

Dari komponen penerimaan PAD diharapkan di tahun 2014 adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, antara lain dari obyek pungutan pajak daerah sebesar Rp. 4.798.486.017.834,-, Retribusi Daerah sebesar Rp. 46.380.023.677,-, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 306.021.172.566,-, sedangkan penerimaan lainnya diharapkan bersumber dari deposito yang pelaksanaan dan besarnya masih belum dapat diprediksi, demikian juga bagi hasil perkebunan (pengusulan bagi hasilnya terus akan menjadi prioritas daerah) dan bagi hasil dari laba yang dikelola sebagai hasil operasional BUMN seperti PT. Angkasa Pura II dan PT. Pelindo sampai saat ini masih dalam proses pembahasan oleh Pemerintah.

Selain itu, penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) diharapkan akan lebih meningkat lagi dari tahun 2013 yang sebesar Rp.1.223.445.404.000,- atau diperkirakan meningkat sebesar 10,55% menjadi Rp. 1.352.518.894.122,-, hal kontraksi akan berbeda dengan

Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak yang akan diestimasikan menurun, sebagai akibat realisasinya di tahun sebelumnya tidak tercapai, diperkirakan akan menurun sekitar -10,24% menjadi Rp. 375.925.982.044,-, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga diperkirakan tetap sebesar Rp. 73.097.930.000,-. Sama seperti rencana tahun anggaran 2013. Dengan demikian kapasitas sumber penerimaan untuk anggaran Pendapatan Daerah diperkirakan pada tahun 2014 akan mencapai Rp. 8,8 triliun.

### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan RKPD Tahun 2014, Pemerintah Daerah berupaya menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah, satuan kerja, dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Selain itu diupayakan agar Belanja Langsung mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Tidak Langsung, dan Belanja Modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa.

Belanja Daerah dikelompokkan menjadi kelompok Belanja Tidak Langsung dan kelompok Belanja Langsung. Adapun kebijakan umum dalam mengalokasikan Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai; dalam rangka mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD telah diperhitungkan akses yang besarnya 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan); penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dan telah memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD rata-rata sebesar 10%; dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur, akan dialokasikan tambahan penghasilan bagi PNSD/CPNSD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi yang dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; biaya pemungutan sebagai bentuk pemberian insentif sejalan dengan kinerja organisasi dalam pencapaian target yang ditetapkan yang besarnya 3% dari target penerimaan pajak daerah; Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta biaya penunjang operasional mempedomani ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Belanja Hibah; pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah (instansi vertikal seperti KPUD dan Bawaslu), semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; penentuan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; dalam pelaksanaan belanja hibah kepada Pemerintah (instansi vertikal) akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal Keuangan Daerah dan Menteri Keuangan up. Direktur Jenderal Anggaran setelah tahun anggaran berakhir; selanjutnya bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

3. Bantuan Sosial; dalam menjalankan fungsi Pemerintah Daerah dibidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, Pemerintah Daerah akan memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besaran bantuannya sejalan dengan jiwa Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dalam arti jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung. Pemberian bantuan sosial didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Belanja Bagi Hasil; dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota disesuaikan dengan rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2014, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2013 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah yang menjadi hak kabupaten/kota akan ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
5. Belanja Bantuan Keuangan; dalam menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, dan pengalokasiannya dalam rangka mendukung prioritas pembangunan provinsi diantaranya pendidikan dalam upaya peningkatan wajib belajar 12 tahun dan ketersediaan alokasi 20% belanja pendidikan, kesehatan dalam upaya penyediaan aksesibilitas kesehatan, pertanian dalam upaya mendukung peningkatan ketahanan pangan, infrastruktur dalam upaya mendukung pembangunan sarana prasarana jalan menuju pusat-pusat produksi pertanian dan kawasan industri, kawasan cepat tumbuh serta sepanjang jalan provinsi dan aksesibilitas menuju daerah objek wisata, serta pengentasan dan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
6. Belanja Tidak Terduga; pengalokasian anggaran belanja tidak terduga dilakukan dengan mempertimbangkan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014; sedangkan penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, yaitu untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.

Sedangkan kebijakan umum dalam mengalokasikan Belanja Langsung antara lain meliputi :

1. Penganggaran belanja langsung untuk setiap kegiatan, terlebih dahulu dilakukan analisis beban kerja dan kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan, untuk menghindari adanya pemborosan;
2. Terhadap kegiatan pembangunan fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.
3. Belanja Pegawai; penganggaran honorarium bagi PNSD supaya dibatasi sesuai dengan tingkat kewajaran dan beban tugas. Dasar penghitungan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan; sedangkan penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi Pemerintah.
4. Belanja Barang dan Jasa; penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultasi baik yang dilakukan secara swakelola maupun dengan pihak ketiga agar dianggarkan pada belanja barang dan

jasa; Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2013. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan; Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel; Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya dibatasi; Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan telah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

5. Belanja Modal; dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris dilakukan sesuai kebutuhan dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya; penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6. Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara  
Tahun 2011 s.d tahun 2015

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi APBD Tahun 2011	Realisasi APBD Tahun 2012	Tahun Berjalan 2013	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2014	Proyeksi/Target pada Tahun 2015
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja pegawai	758.989.635.595	955.151.592.013	523.096.014.491	1.105.000.000.000	1.237.600.000.000
2.1.2	Belanja bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja hibah	307.507.090.000	1.781.350.464.500	2.180.583.066.731	1.690.000.000.000	1.690.000.000.000
2.1.5	Belanja bantuan sosial	44.335.343.000	25.858.294.000	107.804.898.000	85.000.000.000	85.000.000.000
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	801.034.520.611	549.531.769.493	522.700.000.000	2.062.847.168.776	2.000.000.000.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	427.157.797.714	1.844.619.727.373	2.845.619.854.234	1.640.300.000.000	1.600.000.000.000
2.1.8	Belanja tidak terduga	154.500.000	2.574.957.313	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
<b>B</b>	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.339.178.886.920</b>	<b>5.159.086.804.692</b>	<b>6.187.303.833.456</b>	<b>6.590.647.168.776</b>	<b>6.620.100.000.000</b>
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja pegawai	156.928.569.370	160.000.783.996	178.746.265.480	180.000.000.000	200.000.000.000
2.2.2	Belanja barang dan jasa	1.052.132.330.201	1.510.939.323.343	1.587.471.678.604	1.120.050.000.000	1.300.000.000.000
2.2.3	Belanja modal	1.063.237.376.759	803.607.597.827	913.400.474.966	1.409.355.921.885	1.600.000.000.000
<b>C</b>	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.272.298.276.330</b>	<b>2.474.547.705.166</b>	<b>2.679.618.419.050</b>	<b>2.709.405.921.885</b>	<b>3.100.000.000.000</b>
<b>D</b>	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.611.477.163.250</b>	<b>7.633.634.509.858</b>	<b>8.866.922.252.506</b>	<b>9.300.053.090.661</b>	<b>9.720.100.000.000</b>

### 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Anggaran Pembiayaan dibedakan atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 beserta perubahannya Komponen Penerimaan Pembiayaan terdiri dari atas :

- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA).
- Pencairan dana cadangan.
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Penerimaan pinjaman daerah.
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
- Penerimaan piutang daerah.

Sedangkan komponen Pengeluaran Pembiayaan mencakup :

- Pembentukan dana cadangan
- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
- Pembayaran pokok utang; dan
- Pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah

penganggaran belanja yang melebihi pendapatan. Pengaturan tentang kebijakan pembiayaan dalam APBD telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab Keuangan Daerah.

Berdasarkan Pasal 174 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup : pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi daerah); dan transfer ke rekening dana cadangan. Namun apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari : sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu; transfer dari dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan pinjaman daerah.

Untuk kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2014 diperkirakan penerimaan pembiayaan akan diperoleh dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran 2013, yang diperkirakan akan berjumlah lebih kurang Rp. 462.507906.619,-

Penggunaan dari pembiayaan antara lain diprioritaskan untuk menutup defisit anggaran serta penyertaan modal pada beberapa BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara seperti pada PT. Bank Sumut, PDAM Tirtanadi, PT. Perkebunan, PD. AIJ dan PT. Sarana dan Prasarana Daerah, dan PD. Perhotelan, dengan kondisi jika Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah telah ditetapkan, adapun untuk tahun 2014 akan diperhitungkan tidak ada penyertaan modal, selama perda belum ditetapkan.

Adapun secara rinci kondisi dan proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Sumatera Utara disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7. Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah  
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 s.d tahun 2015**

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi APBD Tahun 2011	Realisasi APBD Tahun 2012	Tahun Berjalan 2013	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2014	Proyeksi/Target pada Tahun 2015
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
3.1	Penerimaan pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	404.884.722.999	720.866.153.611	385.050.602.550	462.507.906.618	400.000.000.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>404.884.722.999</b>	<b>720.866.153.611</b>	<b>385.050.602.550</b>	<b>462.507.906.618</b>	<b>400.000.000.000</b>
3.2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	30.917.706.000	256.000.000.000	-	-	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	9.311.996.032	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>30.917.706.000</b>	<b>265.311.996.032</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>373.967.016.999</b>	<b>455.554.157.579</b>	<b>385.050.602.550</b>	<b>462.507.906.618</b>	<b>400.000.000.000</b>